

PERAN STRATEGIS *CITY DIPLOMACY* PEMERINTAH PALEMBANG DALAM MEWUJUDKAN KOTA BERKELANJUTAN RAMAH LINGKUNGAN

Sari Mutiara Aisyah

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Sriwijaya
Email: sarimutiara@fisip.unsri.ac.id

Nur Aslamiah Supli

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Sriwijaya
Email: nur.supli@unsri.ac.id

Angelina Hosana Zefany Tarigan

Program Studi Psikologi, Universitas Sriwijaya
Email: angelinetarigan@fk.unsri.ac.id

Abstract

This study was conducted to see the implementation of environmentally sustainable city development policies which are one of the pillars in the program of SDGs (Sustainable Development Goals) 2030 where local government is placed as the main actor. For the ASEAN regional level, the regional commitments of Regions for the development of environmentally sustainable cities are depicted in the ASEAN Socio-Culture Community Blueprint 2025. The review of this implementation aspect is aimed at identifying developments and challenges faced in the strategic policy of

the Palembang City Government as the main implementing actor towards environmentally sustainable cities in the long term, with the Australia-Palembang Project related the procurement of clean water and sanitation as a case study. In line with these objectives, this study uses qualitative research methods that are exploratory and descriptive in nature, where the depth and context of the data are important. This research results in the finding that the government of Palembang has been considered as an institution that has clear political objectives fully committed in the practice of city diplomacy to involve themselves directly even though it is limited to international cooperation through policy, and balanced communication between government agencies and AUS AID (as an international donor). The City Government is no longer seen as the object of implementing program plans formulated at the central level, but also has the opportunity to formulate a strategic plan or (bottom up) procedure based on the needs of local communities and the suitability of the model with environmentally sustainable city development.

Keywords: *City Diplomacy, Environmentally Sustainable Cities, Palembang, Rural Problems, SDGs*

Abstrak

Kajian ini dilakukan untuk melihat implementasi kebijakan pembangunan kota berkelanjutan ramah lingkungan yang merupakan salah satu pilar dalam program SDGs (Sustainable Development Goals) 2030 dimana pemerintah lokal ditempatkan sebagai aktor utama. Untuk di level regional ASEAN, komitmen negara kawasan untuk pembangunan kota berkelanjutan ramah lingkungan tergambar di dalam Blueprint ASEAN Socio-Culture Community 2025. Kajian terhadap aspek implementasi

ini ditujukan untuk mengidentifikasi perkembangan dan tantangan yang dihadapi dalam kebijakan strategis Pemerintah Kota Palembang sebagai aktor utama pelaksana menuju kota berkelanjutan ramah lingkungan jangka panjang, dengan proyek Australia-Palembang terkait pengadaan air bersih dan sanitasi sebagai studi kasus. Sejalan dengan tujuan tersebut maka kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat eksploratif dan deskriptif, dimana kedalaman dan konteks data menjadi penting. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa Pemerintah Kota Palembang telah dianggap sebagai sebuah institusi yang memiliki clear political objectives berkomitmen secara penuh dalam praktek city diplomacy untuk melibatkan diri secara langsung meskipun dalam gerak terbatas pada kerjasama internasional melalui kebijakan dan komunikasi yang berimbang antar lembaga pemerintahan dan AUS AID (sebagai donor internasional). Pemerintah kota tidak lagi dipandang sebagai objek implementasi rencana program yang dirumuskan pada tingkat pusat, namun juga berpeluang untuk merumuskan rencana strategis atau bottom up prosedur yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat lokal dan kesesuaian model dengan pembangunan kota berkelanjutan ramah lingkungan.

Kata Kunci: *City Diplomacy, Kota Berkelanjutan Ramah Lingkungan, Masalah Perkotaan, Palembang, SDGs*

Pendahuluan

Globalisasi telah merubah cara pandang dalam memaknai realitas internasional. Tidak hanya melahirkan konsepsi yang mengaburkan garis yurisdiksi batas wilayah, namun hal tersebut juga telah mendorong secara aktif aktor-aktor non negara untuk terlibat langsung dalam aktifitas politik, ekonomi dan sosial

budaya dalam lingkup internasional. Keterbukaan zona ekonomi menggiring negara berkembang untuk mengoptimalkan *outward looking policy* demi pembangunan ekonomi mereka, yaitu sebuah kebijakan yang memungkinkan investasi asing dan berujung pada masifnya relokasi basis produksi perusahaan besar multinasional yang menargetkan kota-kota besar di negara berkembang, dan proses industrialisasi ini berdampak langsung pada sosial-ekologis masyarakat lokal. Padahal, dalam kehidupan modern seperti saat ini, aspek ekonomi dan sosial selalu berjalan beriringan dalam hubungan kausalitas. Karena manusia banyak tidak memikirkan aspek lingkungan dalam aspek kehidupannya, natural ekosistem perkotaan semakin lama semakin tergerus digantikan sarana dan prasarana penunjang kehidupan manusia yang mengatasnamakan diri sebagai pembangunan. Akibat dari pembangunan-pembangunan yang tidak memerhatikan daya dukung lingkungan inilah yang akhirnya melahirkan krisis-krisis lingkungan.

Projek jangka panjang pembangunan kota berkelanjutan ramah lingkungan juga tidak lepas dari fenomena urbanisasi. Memasuki tahun 2030, diperkirakan 60% penduduk dunia berada di wilayah perkotaan, dibandingkan dengan masa awal revolusi industri abad ke 19 yang hanya 3% saja. Dari percepatan ini, lebih dari 90% terjadi di dunia berkembang (Leitman, 2006). Sementara Indonesia yang pada awalnya kebanyakan penduduk mendiami area perdesaan, kini 50% dari total penduduk mendiami area perkotaan. Hasil sensus penduduk terakhir pada tahun 2010 menunjukkan bahwa proporsi penduduk perkotaan adalah 49,7%. Sebagai dampak dari pemekaran wilayah kabupaten/kota, Indonesia sekarang memiliki 93 kota otonom dan satu Daerah Khusus Ibukota. Sementara kota-

kota sebelumnya mengalami peningkatan populasi yang cukup tinggi karena urbanisasi. Pada tahun 1950, hanya Jakarta (ibu kota) yang memiliki populasi lebih dari satu juta. Tiga puluh tahun kemudian, pada 1980, ada tiga kota baru yang memiliki populasi lebih dari satu juta, yaitu Surabaya, Bandung dan Medan. Kemudian pada tahun 1990, Semarang, Palembang dan Ujung Pandang (Makassar) memiliki populasi lebih dari satu juta (Katherina, 2018).

Fenomena *urban sprawl* ini telah membawa sejumlah implikasi serius, di antaranya adalah degradasi lingkungan yang sangat masif.

Kondisi ini menyebabkan akses ke fasilitas infrastruktur dasar dan jasa berbasis ketersediaan sumber-sumber daya alam menjadi sangat kompetitif. Sheng (2011) menyatakan bahwa urbanisasi yang cepat dari kota-kota di kawasan ASEAN telah menghasilkan sejumlah dampak negatif: meningkatnya ketidaksetaraan dalam akses ke layanan sosial dasar seperti air, sanitasi, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan, dan meningkatnya masalah lingkungan, termasuk polusi udara dan air, dan tantangan untuk mengatasi meningkatnya jumlah limbah padat. Dalam Laporan Matriks global (*Environmental Performances Index*) tahun 2018, yang dikeluarkan oleh Universitas Yale (lihat tabel 1) menunjukkan status performa Negara ASEAN dalam memprioritaskan keberlangsungan lingkungan masih rendah dalam skala dunia.

Sampai tahun 2018, tidak ada satupun Negara Asia menduduki peringkat 10 terbaik dalam pengelolaan lingkungan, posisi tertinggi ditempati oleh Jepang (20) dan diikuti oleh Taiwan (23). Indonesia sendiri menduduki posisi 133 dari 180 negara dunia dan menjadi negara 4 terbawah ASEAN bahkan dikalahkan oleh Vietnam dan Thailand.

Tabel 1. Ranking country performance on high-priority environmental issues (Regional: Asian Country), 2018

Rank	Country	Score	World Rank
1	Japan	74,69	20
2	Taiwan	72,84	23
3	Singapore	64,23	49
4	Brunei Darussalam	63,57	53
5	South Korea	62,30	60
6	Sri Lanka	60,61	70
7	Malaysia	59,22	75
8	Philippines	57,65	82
9	Mongolia	57,51	83
10	Maldives	52,14	111
11	China	50,74	120
12	Thailand	49,88	121
13	Federated States of Micronesia	49,80	122
14	Timor-Leste	49,54	125
15	Bhutan	47,22	131
16	Vietnam	46,96	132
17	Indonesia	46,92	133
18	Myanmar	45,32	138
19	Cambodia	43,23	150
20	Laos	42,94	153
21	Papua New Guinea	39,35	164
22	Afghanistan	37,74	168
23	Pakistan	37,50	169
24	Nepal	31,44	176
25	India	30,57	177
26	Bangladesh	29,56	179

Diolah dari: 2018 Environmental Performances Index: epi.yale.edu

Pembangunan kota berkelanjutan ramah lingkungan menjadi penting untuk menjadi agenda prioritas pemerintah lokal karena dampak dari pembangunan berkaitan dengan kelangsungan hidup masyarakat lokal. Peran strategis pemerintah kota dan peningkatan *capacity building* sebagai entitas lokal untuk membangun kerjasama internasional juga makin menguat karena sulit untuk membedakan area isu internasional dan lokal. Menurut Garesche (2007), pertumbuhan dan perkembangan pesat kota-kota di berbagai belahan dunia dalam dua dekade terakhir ini telah memperkuat kembali fenomena lama "*paradiplomacy*", dimana kota dan Pemkot memiliki peran penting dalam mempengaruhi hubungan internasional suatu negara dan biasanya mencakup beragam kerjasama seputar permasalahan perkotaan.

Palembang adalah ibu kota Provinsi Sumatera Selatan dan pada saat yang sama sebagai kota metropolitan terbesar kedua di pulau Sumatera dengan total populasi yang diproyeksikan pada tahun 2020 mencapai 1.714.981 dan seluas 358,55 km², dan pusat kegiatan sosial ekonomi di Wilayah Sumatera Selatan. Lokasi Kota Palembang yang sangat strategis terletak di jalur perdagangan nasional dan internasional dan berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Palembang (mewakili Indonesia) telah mendapatkan penghargaan sebagai pemenang ASEAN-ESC (*Environmentally Sustainable Cities*) pada tahun 2008, selanjutnya meraih *Certificate of Recognition (competitive based)* sebagai *Green and Clean Land* untuk Kota-Kota Besar ASEAN pada tahun 2011 dan terpilih sebagai 5 besar kota layak huni di Indonesia (CNN Indonesia TV, 2019). Bertolak dari latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengeksplorasi lebih lanjut tentang kerjasama internasional dalam pembangunan kota

berkelanjutan ramah lingkungan dimana kota sebagai aktor utama, serta mengkaji dinamika penerapan kebijakan pemerintah kota Palembang. Adapun tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan strategis pemerintah kota Palembang dalam kerjasama internasional yang berkenaan dengan pembangunan kota berkelanjutan ramah lingkungan.
2. Untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pemerintah Kota Palembang menuju kota berkelanjutan ramah lingkungan jangka panjang.

Kerangka Pemikiran

City Diplomacy dan Glocal Governance

Abad 20 telah menghadirkan konsep dan praktek diplomasi publik yang mendorong kehadiran *non state actor* untuk dapat memainkan peran secara aktif dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam level lokal oleh pemerintah daerah atau yang dikenal dengan istilah *city diplomacy*. Konsep ini dapat didefinisikan sebagai institusi dan proses dimana kota terlibat dalam kerjasama dengan aktor dalam ruang lingkup politik internasional dengan tujuan untuk merepresentasikan kepentingan mereka satu sama lain (Van der Pluijm dalam Gutiérrez-Camps, 2013). Namun, tidak semua aktifitas internasional dari pemerintah lokal dapat dikategorikan sebagai *city diplomacy*. Menurut La Porte (2012) saat mendefinisikan kegiatan diplomasi publik, ada dua kondisi yang harus terpenuhi sebagai aktifitas *city diplomacy*: aktor yang mengambil inisiatif kerjasama setidaknya harus terlembaga dan memiliki tujuan politik yang jelas. Dengan kata

lain, aktor tersebut harus secara sadar memiliki *a desire to have a permanent influence on policies, procedures and international relations*. Terpenuhiya kondisi tersebut, secara tidak langsung pemerintah lokal/daerah telah berkontribusi untuk mengaburkan garis batas antara kebijakan nasional dan hubungan internasional. Hal ini tergambar dalam konsepsi Koo-hong Chan (2016) menyebutkan bahwa *city diplomacy* sebagai *trans-municipal* hubungan horizontal antara kota *sovereignty-free* yang bekerja melalui *peer to peer ties* antara *municipal official* dalam menyelesaikan permasalahan spesifik atau tantangan Bersama. Tanpa keharusan untuk memenuhi kewajiban prinsip kedaulatan, kota dapat mengenyampingkan hambatan ideologi dan menyelesaikan masalah yang tidak bisa dilalui oleh praktek dan kebijakan politik negara.

Meskipun maraknya inisiatif kerjasama antar kota antar negara di dunia ini semakin mengukuhkan jejaring kerjasama kota-kota di seluruh dunia (Keiner & Kim t.t., 2000), hal ini tidak serta merta merefleksikan versi kecil dari hubungan internasional tradisional. Garis hubungan kerjasama antar kota lintas negara ini lebih dimaksudkan sebagai suatu cara yang efektif untuk memperkuat kapasitas kota dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dan lingkungan, memberikan pelayanan publik yang lebih memadai bagi masyarakatnya, serta mengembangkan tata kelola dan struktur manajemen kota. Intensitas jejaring kerja sama ini bahkan mampu mendorong munculnya fenomena baru yang disebut *glocal governance*. Selaras dengan hal tersebut, Giddens (2013) mengemukakan bahwa ada 3 arah dalam proses globalisasi: *upward, downward and sideward*. Proses *upward* diartikan bahwa globalisasi memiliki kemampuan untuk menghilangkan konsepsi

lama tentang batas negara, menuju dunia liberal dan kosmopolitan. Bersamaan dengan proses tersebut, globalisasi juga memiliki daya tekan *downward* yang memotivasi entitas lokal untuk meredefinisi fungsi dan peran mereka setelah menghilangnya konsep tradisional negara bangsa. Selanjutnya dalam tahapan *sideward* menghadirkan zona ekonomi dan kerjasama yang dibangun oleh entitas lokal melalui jalur transnasional. Konsep ini secara akurat menggambarkan sebuah kondisi mengapa entitas lokal mulai diperhitungkan di dunia yang kemudian dikenal dengan istilah *glocalization* atau *the globalizing of local actors*.

Environmentally Sustainable Cities: Green Building Practices

Dalam skala internasional, terdapat tiga rezim yang mengatur hal ini, yakni Agenda 21, *Millennium Development Goals* (MDGs) dan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Wacana mengenai keterlibatan otoritas lokal dalam pembangunan berkelanjutan berawal dari Agenda 21 *Earth Summit* di Rio de Janeiro, Brazil 1992. Keterlibatan kota sebagai pendukung pembangunan berkelanjutan didasari oleh indikator pembangunan berkelanjutan Agenda 21 (lihat tabel 2). Selanjutnya, agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan dibahas pada pertemuan puncak PBB di New York akhir 2015. Poin 11 dalam SDGs fokus pada pembangunan perkotaan berkelanjutan yang bertujuan untuk menciptakan kota yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan baik secara ekonomi, sosial dan lingkungan. Kota memiliki peran yang cukup besar terhadap pembangunan berkelanjutan.

Sebagian besar tujuan dari agenda 2030 hanya dapat dicapai jika mobilisasi pemerintah lokal dan upaya membuat daerah perkotaan berkelanjutan. Agar implementasi dari SDGs bisa

berhasil, maka diharuskan adanya sinergisitas dan pemberdayaan *civil society*, termasuk juga aktor yang berbeda dari segi ekonomi, sosial dan politik. Kolaborasi dan peningkatan kerjasama antara level pemerintah yang berbeda juga penting agar implementasi dari SDGs bisa berhasil (UN-Habitat, 2016). Tidak mengherankan jika akhir-akhir ini banyak akademisi yang melakukan studi atau penelitian yang berkaitan dengan penerapan model kebijakan berbasis perlindungan lingkungan hidup (*green policy*) yang diprakarsai oleh instansi tertentu dan diterapkandengan cara-cara yang ditetapkan oleh instansi tersebut. Dalam kerangka praktis (*green building practices*) kemudian dapat diartikan sebagai *efficiently use energy, water, and other resources; protect occupant health and improve employee productivity; and reduce waste, pollution and environmental degradation* (US EPA, 2012).

Tabel 2. Indikator Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Agenda 21 Earth Summit di Rio de Janerio, Brazil 1992

Dimensi Sosial Dan Ekonomi	Konservasi Dan Pengelolaan Sumber Daya Untuk Pembangunan	Memperkuat Peran Kelompok-Kelompok Besar
Mengintegrasikan lingkungan dan pembangunan dalam pengambilan keputusan	Perlindungan atmosfer	Memperkuat peran organisasi non-pemerintah
	Pendekatan terpadu terhadap perencanaan dan pengelolaan sumber daya lahan	Inisiatif otoritas lokal dalam mendukung Agenda 21
	Mengelola ekosistem yang rapuh: memerangi penggurunan dan kekeringan	

	Perlindungan kualitas dan pasokan sumber daya air tawar: penerapan pendekatan terpadu untuk pengembangan, pengelolaan dan penggunaan sumber daya air	
--	--	--

Sumber: diolah dari *Agenda 21 Contents* dalam sustainabledevelopment.un.org

Indikator sangat penting dalam upaya perencanaan keberlanjutan untuk melihat potensi target dari pembangunan keberlanjutan yang ingin dicapai. Agenda 21 menghasilkan komitmen-komitmen umum terkait rencana komprehensif untuk membangun kerjasama secara global terkait pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan kehidupan manusia dan lingkungan. Komitmen tersebut kemudian berkembang ketika negara-negara anggota membuat sebuah deklarasi milenium pada *Millenium Summit* di bulan September 2000 yang dibawah langsung oleh PBB. KTT ini pada akhirnya mengarah pada penjabaran delapan tujuan pembangunan milenium atau yang lebih dikenal dengan sebutan MDGs (*Millenium Development Goals*). MDGs memiliki Indikator-indikator untuk memantau tujuan serta target pembangunan yang terfokus pada pembangunan sosial. MDGs bersifat lebih mengikat dibandingkan Agenda 21 karena pemantauan terhadap perkembangan MDGs dilakukan secara global, melalui laporan tahunan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa kepada Majelis Umum, dan melalui pelaporan masing-masing negara secara berkala. Laporan yang diberikan harus berdasarkan kepada indikator internasional yang dibuat

berdasarkan konsep standar, definisi, dan metodologi yang sesuai dengan perbandingan lintas negara. Tujuan ke-7 dari MDGs mengenai kepastian keberlanjutan lingkungan juga memiliki beberapa indikator yang lebih terperinci sesuai dengan target tertentu yang ingin dicapai.

Tabel 3. Indikator Keberlanjutan Lingkungan Berdasarkan *Millenium Development Goals*

Target	Indikator
Target 9: Integrate the principles of sustainable development into country policies and programmes and reverse the loss of environmental resources	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Proportion of land area covered by forest</i> - <i>Ratio of area protected to maintain biological diversity to surface area</i> - <i>Energy use (kg oil equivalent) per \$1 GDP (PPP)</i> - <i>Carbon dioxide emissions (per capita) and consumption of ozone-depleting CFCs (ODP tons)</i> - <i>Proportion of population using solid fuels</i>
Target 10: <i>Halve, by 2015, the proportion of people without sustainable access to safe drinking water and basic sanitation</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Proportion of population with sustainable access to an improved water source, urban and rural</i> - <i>Proportion of urban and rural population with access to improved sanitation</i>
Target 11: By 2020, to have achieved a significant improvement in the lives of at least 100 million slum dwellers	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Proportion of households with access to secure tenure</i>

Sumber: Diolah dari *MDGs's Indicators* dalam undp.org

Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) mencerminkan komitmen ASEAN serta menyajikan serangkaian tujuan dan target

untuk mendukung pembangunan berkelanjutan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1(b) Piagam ASEAN, untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan untuk memastikan, antara lain, kualitas hidup masyarakat yang tinggi. Sesuai dengan komitmen tersebut, ASEAN juga mengadopsi indikator-indikator dalam Tujuan 7 MDGs untuk mengukur pencapaian keberlanjutan lingkungan di kawasan. Indikator tersebut yakni; proporsi lahan yang tertutup oleh hutan, proporsi penduduk yang menggunakan sumber air minum yang lebih baik, dan proporsi penduduk yang menggunakan fasilitas sanitasi yang ditingkatkan. Sebagian besar target MDGs setidaknya telah diselesaikan dan banyak negara sedang menuju pencapaian MDGs untuk mengadopsi jalur yang berkelanjutan. Namun ternyata, target global MDGs tidak dapat terpenuhi di beberapa wilayah, terutama Afrika sub-Sahara dan Asia Selatan. Ketidakberhasilan ini disebabkan oleh beberapa faktor, yakni:

1. MDGs bukan produk dari analisis komprehensif dan prioritas kebutuhan pembangunan yang terlalu sempit.
2. Kerangka kerja MDGs belum memberikan pertimbangan yang cukup terhadap dampak potensial pada dimensi lingkungan, sosial dan ekonomi. Aspek lingkungan memang dibahas di bawah tujuan 7, tetapi MDGs mengabaikan masalah utama untuk pembangunan berkelanjutan.
3. Kurangnya komitmen akibat kurangnya rasa kepemilikan dan kepemimpinan atas program MDGs yang jelas secara internasional dan nasional sehingga memengaruhi sebagian pencapaian MDGs.

Kekurangan dari MDGs kemudian dicoba untuk diperbaiki dalam SDGs (Sustainable Development Goals). Dimensi lingkungan dari pembangunan berkelanjutan pun sepenuhnya disempurnakan dalam tujuan SDGs. Dalam upaya pencapaiannya, indikator SDGs terkait pembangunan berkelanjutan kota ramah lingkungan yang dipilih adalah:

Tabel 4. Indikator Pembangunan Kota Berkelanjutan Ramah Lingkungan

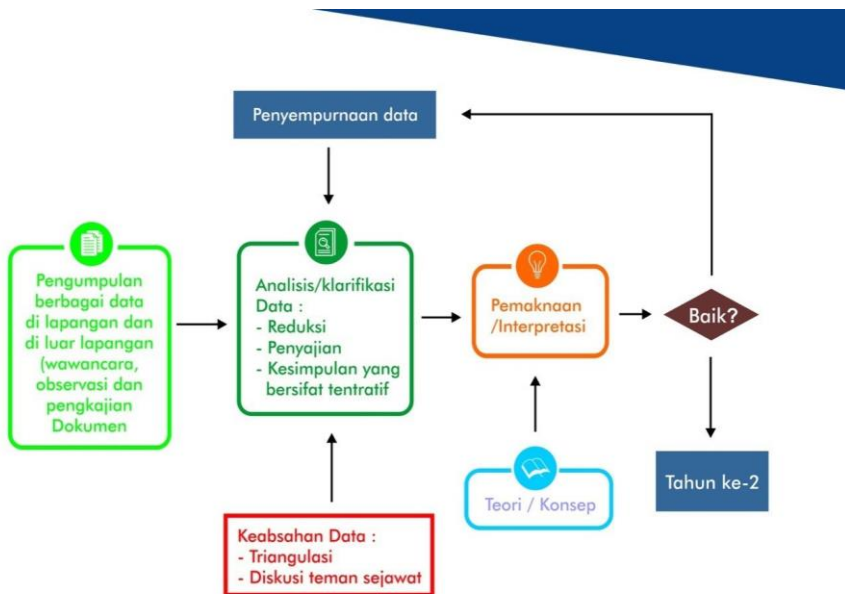
Goal 6	Goal 11	Goal 15
Proportion of population using safely managed drinking water services	Proportion of urban population living in slums, informal settlements or inadequate housing	Forest area as a proportion of total land area
Proportion of wastewater safely treated	Ratio of land consumption rate to population growth rate	Proportion of important sites for terrestrial and freshwater biodiversity that are covered by protected areas, by ecosystem type
Change in water-use efficiency over time	Proportion of urban solid waste regularly collected and with adequate final discharge out of total urban solid waste generated, by cities	Proportion of land that is degraded over total land area
Level of water stress: freshwater withdrawal as a proportion of available freshwater resources		

Sumber: Diolah dari: *Environmentally-related SDG indicators and the UNSD/UN Environment Questionnaire on Environment Statistics* dalam unstats.un.org

Untuk dilevel regional ASEAN, komitmen negara kawasan untuk pembangunan berkelanjutan ramah lingkungan tergambar didalam blueprint ASEAN *Socio-Culture Community* 2025. Pada awalnya terinspirasi dari adanya *Singapore Declaration on Climate Change, Energy and The Environment* yang kemudian diadopsi dalam *East Asia Summit* ketiga pada November 2007 di Singapore. Kemudian setahun setelahnya, diadakan *Inaugural EAS Environment Ministers Meeting* (EMM) di mana Menteri Lingkungan Hidup semua negara ASEAN melakukan pertemuan di sana dan menyetujui bahwa *Environmentally Sustainable Cities* (ESC) harus menjadi prioritas bagi negara-negara ASEAN sebagai langkah bersama dalam lingkungan. Fasenyanya dibagi menjadi 3 dengan kurun waktu dari tahun 2011-2017. Untuk negara Indonesia, kota-kota yang masuk dalam fase pertama adalah Palembang dan Surabaya, fase kedua adalah Balikpapan, Lamongan, Malang, dan Tangerang, serta fase ketiga yaitu Banjarmasin dan Malang. Saat ini sudah mau memasuki fase keempat dengan mengkombinasikan SDGs (Teoh, 2017). Adapun indikator yang telah ditetapkan adalah *Clean Water*, *Clean Air*, dan *Clean Land*. Jika sebelumnya pada *ASCC Blueprint* 2009-2015 pelaksanaannya didominasi oleh koordinasi regional dan nasional (pemerintah pusat), baru secara eksklusif partisipasi langsung kota (pemerintah lokal) telah menjadi sub komponen terpisah dalam *ASCC Blueprint* 2025.

Metode Penelitian

Bagan 1. Proses analisis Data Kualitatif



Sumber: Diolah dari berbagai sumber oleh peneliti

Dari berbagai indikator pembangunan kota berkelanjutan ramah lingkungan, salah satunya adalah ketersediaan air bersih dan sanitasi, selanjutnya akan menjadi fokus analisa dalam penelitian ini. Adapun pembatasan permasalahan dalam penelitian ini adalah pada proyek Australia-Palembang terkait pengadaan instalasi air bersih dan sanitasi yang merupakan bentuk dukungan Pemerintah Australia atas Prakarsa Infrastruktur Indonesia (IndII) sejak tahun 2011. Metode pengumpulan data adalah teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer melalui wawancara dan observasi sekaligus data sekunder melalui

telaah dokumentasi. Data wawancara mendalam dituangkan ke dalam transkrip hasil wawancara, data observasi dituangkan kedalam catatan dan laporan observasi, sementara data dokumen akan dipilih dan disajikan dalam laporan penelitian. Peneliti akan membaca semua data dan melakukan analisis data melalui reduksi data serta display data. Tahapan akhir barulah melakukan penarikan kesimpulan. Metode yang digunakan dalam menguji keabsahan data ialah dengan metode triangulasi. Disini jawaban subyek akan *dicross-check* dengan jawaban narasumber lainnya serta dokumen-dokumen yang ada. Selain itu, dilakukan dengan pemeriksaan sejawat melalui diskusi. Hal ini dimaksudkan memberikan suatu kesempatan awal yang baik untuk memulai menjajaki dan menguji hipotesis yang muncul dari pemikiran peneliti. Dalam diskusi ini juga bisa terungkap segi-segi lainnya yang justru membongkar atau membuka pemikiran peneliti.

Hasil dan Pembahasan

Projek Australia-Palembang Terkait Pengadaan Air Bersih dan Sanitasi

AustraliamelaluiAUSAIDyaituBadanKerjasamaPembangunan Internasional Australia yang pembentukannya bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di negara-negara berkembang melalui program bantuan luar negeri yang dibiayai oleh Pemerintah Federal Australia melakukan kerjasama dengan Pemerintah Indonesia salah satunya *Australia-Indonesia Infrastructure Grants* (AIIG) dimana Australia melalui AIIG memberikan penyaluran dana dalam bentuk hibah dimana salah satu programnya adalah pengadaan air bersih dan sanitasi. Kerjasama ini merupakan

bentuk dukungan Pemerintah Australia atas Prakarsa Infrastruktur Indonesia (IndII) dengan memberikan bantuan kepada Pemerintah Indonesia selama 2010–2011 untuk menyiapkan rencana induk saluran air limbah untuk menyusun kriteria pemilihan kota yang akan dimasukkan kedalam rencana induk (*Master Plan*) program MSMIP (*Metropolitan Sanitation Management Investment Project*) awal di Indonesia. Kota-kota yang dipilih adalah Palembang, Pekanbaru, Cimahi, dan Makassar dari daftar rencana induk dan Jambi dari luar daftar (Prakarsa, 2012). Selama persiapan MSMIP, Pemerintah Indonesia meminta Pemerintah Australia agar hibah yang dijanjikan di bawah *Australia-Indonesia Infrastructure Grants* (AIIG) diterapkan pada komponen MSMIP di Palembang. Pemerintah Indonesia setuju, mencatat bahwa kota Palembang memiliki kepentingan strategis yang berbeda untuk perekonomian Sumatera.

Metropolitan Sanitation Management Investment Project (MSMIP) merupakan kegiatan dengan pendanaan kombinasi dari pinjaman Asian Development Bank (ADB), Hibah Pemerintah Australia, Dana Pemerintah Pusat (APBN) serta Dana Pemerintah Kota dan Provinsi (APBD). *Palembang City Sewerage Project* (PCSP) adalah salah satu sub proyek dari MSMIP yang tidak didanai oleh ADB tetapi didukung oleh dana DFAT (*Department of Foreign Affairs and Trade Australia*). Secara total MSMIP (*Metropolitan Sanitation Management Investment Project*) akan menambahkan 221.500 penerima manfaat langsung melalui 44.300 koneksi properti, dimana 60.000 penerima manfaat dan 12.000 koneksi akan dibangun dari Palembang.

Salah satu faktor terpilihnya kota Palembang untuk mendapatkan dana hibah DFAT melalui program PCSP untuk membangun saluran IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah)

terbesar di Indonesia yang akan aktif beroperasi pada tahun 2022 adalah komitmen penuh yang ditunjukkan oleh pemerintah kota Palembang pada proyek Hibah AUS AID sebelumnya untuk intalasi air minum. Hibah ini bersumber dari penerimaan APBN (pendapatan murni APBN, pinjaman dan hibah luar negeri) yang diteruskan kepada Pemerintah Daerah. Berdasarkan buku pedoman pengelolaan program hibah air minum yang disusun oleh Kementerian PUPR (2012), untuk mendapatkan dana hibah dari Program Hibah Air Minum ini, Pemerintah Daerah disyaratkan untuk melakukan investasi terlebih dahulu sampai dengan terjadinya pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan program ini, Pemda akan memberikan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada PDAM. Selanjutnya, PDAM akan melaksanakan kegiatan pembangunan. Dana hibah dapat dicairkan oleh Pemerintah Daerah setelah adanya rekomendasi atas hasil verifikasi terhadap kinerja pelayanan kepada pelanggan yang menjadi sasaran program ini. Program Hibah Air Minum ini dimaksudkan sebagai insentif bagi Pemerintah Daerah agar bersedia meningkatkan modal PDAM yang selama ini dirasakan masih kurang. Dengan mengikuti program ini diharapkan Pemerintah Daerah penerima hibah dapat memanfaatkan dan melanjutkan kebijakan penambahan modal PDAM sesuai dengan kebutuhan pelayanan di masing-masing wilayahnya serta dapat meningkatkan kinerja pengelolaan dan pelayanan PDAM kepada para pelanggannya terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Ini adalah suatu upaya percepatan penambahan jumlah sambungan rumah (SR) baru melalui penerapan output based atau berdasarkan kinerja yang terukur.

PDAM Tirta Musi Palembang kembali menunjukkan performa terbaiknya secara konsisten sejak hibah ini berjalan sebagai penyedia jasa air bersih di kota Palembang (lihat tabel 5) dan kembali terpilih untuk menjadi pelaksana teknis hibah lanjutan pembangunan IPAL. Program hibah ini didasarkan atas prinsip bila suatu daerah berinvestasi di sistem air minum, maka mereka diberi ganjaran baik berupa dana yang sesuai dengan sambungan baru yang beroperasi. Fokus program ini adalah rumah tangga miskin. Model pelaksanaan tertuang pada RPI-2JM Kota Palembang periode 2016-2020 (sippa.ciptakarya) :

1. Pemasangan jaringan perpipaan transmisi dan distribusi pada wilayah perluasan untuk berbagai diameter antara lain di Jl. Sukarno-Hatta, Jl. Gubernur H Bastari, Jl Sriwijaya Raya, Jl. Yusuf Singedikane, Jl. Ki Merogan, Jl. Letkol Iskandar, Jl. Perumnas Raya, Jl. HBR Motik, Jl. Dencik Asari, Jl. Kartika, Jl. Talang Buruk, Jl. Tanjung Barangan, Jl. Tanjung Aur, Jl. Tridarma Soak Bujang, Jl. Sofyan Kenawas, dan jalan lainnya yang belum teraliri air bersih.
2. Pembangunan Booster Pump di Gandus dan Tegalbinangun Plaju.
3. Penambahan pompa air baku dan daya PLN pada *Intake* yang memerlukan.
4. Peningkatan kapasitas terpasang seluruh IPA.

Tabel 5. Kinerja PDAM Berdasarkan Penilaian Akuntan Publik

URAIAN	Unit	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tarif Air Rata Rata	Rp./m ³	4.378	4.225	4.189	4.131	4.123	4.187
Biaya Air	Rp./m ³	2.815	2.803	2.927	2.851	2.782	2.743
Persentase Tarifd Air/ Biaya Air	%	156%	151%	143%	145%	148%	153%
Status FCR		FCR	FCR	FCR	FCR	FCR	FCR
Kondisi Perusahaan		SEHAT	SEHAT	SEHAT	SEHAT	SEHAT	SEHAT

Sumber: Paparan PDAM (2018), Arsip Bappeda Kota Palembang

Pemberian hibah Australia melakukan hibah kepada Pemerintah Palembang dalam pengadaan air minum dan air bersih untuk masyarakat Palembang yang targetnya adalah meningkatkan kesehatan dan produktivitas 100.000 penduduk di Palembang (*DFAT Report, 2017-2018*). Sejak program ini di implementasikan, setidaknya dalam kurun waktu 2012-2017 (lihat tabel 6), ada penambahan jumlah pelanggan sebanyak 73.580 dan terus bertambah hingga mencapai target awal pemberian hibah. Program ini kemudian diresmikan melalui beberapa kebijakan Pemerintah Kota Palembang, diantaranya:

- Peraturan Daerah Kota Palembang No. 21 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Musi Palembang, Pasal III (Penyertaan Modal), Ayat 2 yaitu penambahan penyertaan modal daerah Pemerintah Kota pada PDAM Tahun 2010 berupa dana sebesar Rp.11.000.000.000,- (sebelas miliar rupiah) bersumber pada Hibah Pemerintah Australia yang diteruskan kepada Pemerintah Kota untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan akses penyediaan air bersih bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

- Peraturan Daerah Kota Palembang No. 12 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Musi Palembang, Pasal III (Penyertaan Modal), Ayat 2 yaitu penambahan penyertaan modal daerah Pemerintah Kota pada PDAM Tahun 2011 berupa dana sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) bersumber pada Hibah Pemerintah Australia yang diteruskan kepada Pemerintah Kota untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan akses penyediaan air bersih bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
 - Peraturan Daerah Kota Palembang No. 10 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Musi Palembang, Pasal III (Penyertaan Modal), Ayat 2 dan 3 yaitu Penambahan penyertaan modal daerah Pemerintah Kota pada PDAM Tahun 2013 berupa dana sebesar Rp.21.000.000.000,- (dua puluh satu miliar rupiah) bersumber pada Hibah Pemerintah Australia yang diteruskan kepada Pemerintah Kota untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan akses penyediaan air bersih bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Tabel 6. Kondisi Pelayanan 2012 –2017

URAIAN	Unit	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Penduduk	People	1.503.485	1.540.603	1.571.466	1.603.539	1.602.071	1.623.099
Area Terlayani	%	57	68	67,04	72,47	81,18	82,83
Konsumsi Air Rata Rata	m ³ /HC/month	29	29	29	29	29	29
Jumlah Pelanggan	HC	200.285	224.065	224.425	257.189	264.839	273.580
NRW	%	28,57	24,91	23,61	21,89	20,20	19,29
Kapasitas IPA	l/sec		3.635	3.644	3.644	3.644	3.644
Jumlah Air Produksi	m ³	102.403.179	106.144.538	113.586.758	116.573.591	118.278.054	119.034.712
	l/sec	3.247	3.366	3.601	3.638	3.751	3.775
Jumlah Air Distribusi	m ³	100.448.456	103.988.212	111.602.488	114.739.987	116.480.842	117.443.014
Jumlah Air Terekening	m ³	71.748.463	78.088.986	85.251.496	89.619.473	92.951.710	94.783.589

Sumber: Paparan PDAM (2018), Arsip Bappeda Kota Palembang

Kota Palembang telah mengubah utilitas airnya dari menjadi salah satu yang terburuk di Indonesia Indonesia menjadi salah satu yang terbaik, dan setelah fase pertama program Hibah Air Minum menginvestasikan kembali uang diganti oleh program kembali ke utilitas airnya untuk memasang lebih banyak koneksi rumah. Senada dengan pernyataan Kurniawan, S.T (Kasubbid Permukiman, Bappeda Kota Palembang) bahwa secara keseluruhan, pemerintah Kota Palembang telah menunjukkan komitmen dan kapasitasnya untuk menjadi pemerintah lokal pertama yang mencoba pendekatan penerusan hibah yang diusulkan untuk PCSP karena Pemerintah Australia puas dengan performa pemerintah kota dalam hibah air minum dan air bersih sebelumnya. Pemerintah Kota juga telah dinilai lebih siap dibandingkan kota lain, karena telah berhasil melakukan akuisisi tanah yang dibutuhkan untuk

instalasi pengolahan air limbah pada 2012/13; penganggaran untuk aspek persiapan proyek lainnya (termasuk kompensasi pemukiman kembali dan tanah akuisisi untuk stasiun pompa).

Jika pada hibah sebelumnya, secara konvensional komponen dari MSMIP yang didanai oleh ADB (*Asian Development Bank*), mekanisme hibah air dan sanitasi dirancang oleh lembaga-lembaga di pemerintah pusat seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Keuangan. Hibah harus dikelola dan dianggarkan dalam mekanisme APBN dan APBD, berdasarkan peraturan terkait. Untuk hibah air dan sanitasi, ada sejumlah langkah yang terkait dengan implementasi termasuk seleksi pemerintah lokal, perjanjian hibah, peraturan investasi lokal, persiapan dokumen anggaran (DIPA – Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), konstruksi, verifikasi teknis, persiapan surat rekomendasi, permintaan pembayaran dan verifikasi dokumen, pembayaran, dan pelaporan. Melalui PCSP, Pemerintah Kota Palembang memiliki peluang yang lebih besar untuk terlibat didalam perancangan proyek hibah internasional yang didanai langsung oleh Pemerintah Australia. PCSP memiliki skema yang berbeda, keputusan pemerintah Australia untuk menerapkan hibah ke kota daripada anggaran kementerian pusat melalui hibah DFAT untuk instalasi air bersih dan sanitasi, telah menunjukkan kekuatan transformatif pembiayaan dan implementasi layanan air dan sanitasi di tingkat Pemerintah Kota. Sebagai hibah tingkat kota, PCSP menangani beberapa masalah sektoral utama, termasuk rendahnya tingkat keterlibatan Pemda dalam infrastruktur air limbah, kesenjangan dalam komitmen sumber daya antara pemerintah pusat dan daerah, dan ketidakberlanjutan dari investasi

tanpa kepemilikan lokal atas aset.

Komponen MSMIP yang dibiayai melalui pinjaman ADB, dan disampaikan secara konvensional melalui implementasi program pemerintah pusat, memiliki ruang yang sedikit bagi pemerintah kota untuk terlibat secara langsung. Pekerjaan fisik *ditenderkan* dan dilaksanakan melalui delegasi anggaran Kementerian PUPR di provinsi tersebut dan sedikit peluang dalam keterlibatan Pemerintah Kota selama proses implementasi. Sebaliknya, model PCSP memberi tanggung jawab langsung kepada Pemerintah Kota untuk implementasi program yang selanjutnya akan mereka miliki dan operasikan. Modalitas ini lebih selaras dengan kebijakan Pemerintah Indonesia untuk desentralisasi dan otonomi daerah. Oleh karena itu, poin kunci untuk menilai adalah sejauh mana PCSP menunjukkan kualitas dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan proyek yang setara dengan komponen yang dilaksanakan secara konvensional di bawah MSMIP. Struktur MSMIP cocok untuk menguji dan menunjukkan bahwa keterlibatan dan penyampaian proyek melalui Pemerintah Kota adalah alternatif yang layak untuk modalitas implementasi pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan dana hibah untuk Palembang *sewerage* ditransfer langsung ke Pemerintah Kota, Palembang pada gilirannya telah mengalokasikan sebagian besar dari anggarannya sendiri untuk proyek tersebut. Pemerintah provinsi juga telah memberikan kontribusi pendanaan sebagai bantuan keuangan langsung kepada pemerintah Palembang. Bersama-sama, pemerintah kota dan provinsi telah menyumbang AUD 31 juta dana pendamping, atau 69 persen dari nilai hibah AUD 45 juta. Sebagai perbandingan, pemerintah daerah MSMIP lainnya menyumbangkan dana setara dengan 21 persen dari pinjaman.

Pada akhirnya, dana hibah di Palembang memanfaatkan lebih dari tiga kali tingkat pendanaan daerah yang dicapai di kota-kota MSMIP yang menggunakan model pembangunan konvensional Kementerian PUPR (Lihat tabel 7).

Tabel 7. Cost Sharing for PCSP and MSMIP Cities

	ADB	DFAT	Gol	LG/Prov.	Total	LG Funding as % of:	
						Loan/Grant	Total
Palembang		45	33	31	109	69%	28%
Other MSMIP*	162		98	24	296	21%	12%
All MSMIP	162	45	132	75	415		

* All figures in AUD million. The ADB loan of USD 120 and other US costs converted at AUD 1.35 = 1 USD.

Sumber: *Document Palembang City Sewerage Project*, Agustus, 2017

Mekanisme pendanaan hibah memungkinkan Palembang untuk mengimplementasikan porsi hibah Australia dari PCSP sebagai proyek mereka sendiri, dan dengan demikian mempertahankan kepemilikan aset. Sebaliknya, bagian-bagian proyek yang didanai dari anggaran Kementerian PUPR tetap menjadi aset Pemerintah Indonesia sambil menunggu proses transfer aset yang panjang sebelum Pemerintah Kota mendapatkan kepemilikan yang sah. Selama proses panjang ini, Pemerintah Kota memiliki opsi terbatas untuk manajemen dan pemeliharaan infrastruktur. Dalam kasus Palembang, hibah digunakan untuk membangun pabrik pengolahan dan stasiun pompa, sehingga Pemda mendapat kepemilikan komponen inti dari sistem saluran pembuangan karena kota ini juga akan menerapkan setengah dari jaringan utama dengan dukungan dari Pemerintah Provinsi, mereka akan secara efektif memiliki 75 persen dari sistem dan akan dapat mengoperasikan keseluruhan sistem secara berkelanjutan. Selain itu, mereka akan

berada dalam posisi yang kuat untuk mendesak transfer aset dengan cepat dari sisa 25 persen yang dimiliki oleh Kementerian PUPR. Melalui penggunaan modalitas hibah, PCSP diharapkan mampu menunjukkan keuntungan melibatkan Pemerintah Kota dalam pelaksanaan proyek infrastruktur dan kepemilikan aset. DFAT akan dapat menguji efektivitas modalitas melalui evaluasi dampak pasca konstruksi terhadap kontrafaktual alami yang diberikan oleh pendekatan pembangunan proyek konvensional untuk tiga kota MSMIP lainnya.

Dukungan bilateral Australia dalam pengembangan program hibah untuk air dan sanitasi telah diakui untuk menyediakan bantuan teknis yang komprehensif, dukungan untuk membangun, menerapkan dan mengkonsolidasikan mekanisme untuk penyampaian program. Australia juga telah mengakui keahlian dan kemampuan teknis dan manajerial dalam sanitasi sektor bersama dengan pemahaman yang baik tentang kebijakan dan lembaga sektor Indonesia. Bantuan Australia telah memainkan peran penting dalam uji coba dan peluncuran air berbasis hasil hibah, sebuah program yang telah berhasil mendorong investasi dan keterlibatan Pemda yang lebih besar di Indonesia memperluas jaringan rumah tangga dengan akses ke air pipa. Proyek ini dipimpin oleh pemerintah kota Palembang, dan dana hibah dari negara Australia akan disalurkan melalui mekanisme penerusan Hibah Pemerintah Indonesia (APBN yang nantinya disalurkan ke daerah).

Hibah DFAT akan diimplementasikan menggunakan peraturan pemberian hibah Kementerian Keuangan (KEMENKEU) berdasarkan *output*, di mana Palembang secara progresif mengimplementasikan

program dan secara progresif mendapatkan penggantian untuk hasil yang diselesaikan, dalam mekanisme *pending*, menunggu tinjauan yang memuaskan dan verifikasi pekerjaan. Pengukuran dan verifikasi akan dilakukan oleh *Construction Management Consultant* (CMC), yang akan didanai oleh DFAT dan *procure* melalui *Facility Managing Contractor* (FMC). Pemerintah Kota melakukan pra-pembiayaan pekerjaan dan membayar kontraktor berdasarkan pekerjaan yang diukur. Menunggu rekomendasi positif dari CMC, pemerintah kota kemudian dapat mengklaim penggantian dari Badan Pelaksana (Kementerian PUPR) untuk pekerjaan yang didanai hibah DFAT. Hibah akan dibayarkan setelah peninjauan bersama atas klaim oleh KEMENKEU dan FMC. Evaluasi kinerja dua modalitas akan dilakukan selama implementasi dan operasi aset, dan akan mencakup evaluasi kelembagaan yang komprehensif dan parameter operasional, menghasilkan penilaian keseluruhan dari nilai-untuk-uang yang dicapai. Ini akan memberikan masukan yang berharga bagi Pemerintah Indonesia dalam tujuan jangka panjangnya untuk menyediakan akses yang lebih besar pembiayaan investasi langsung ke pemerintah kota melalui Pengembangan Infrastruktur *Regional Fund*.

Tantangan Implementasi Proyek PCSP (*Palembang City Sewerage Project*)

PCSP didasarkan pada *masterplan* yang disiapkan oleh Prakarsa Infrastruktur Indonesia (IndII) selama 2010/11 yang menetapkan tahapan pengembangan sistem saluran air limbah di seluruh kota untuk Palembang. Rencana induk awalnya diprioritaskan kawasan pusat kota, karena titik ini menawarkan klien potensial yang paling

mungkin menilai ketersediaan saluran air limbah layanan dan bersedia membayar tarif. Lingkup PCSP yang dirancang terdiri dari jaringan selokan sepanjang 220 km yang mencakup 665 ha kota pusat, dibagi menjadi lima tangkapan air dan melayani 21.700 properti komersial dan domestik. PCSP akan melayani 100.000 orang, 5 persen dari populasi kota. Limbah dikumpulkan oleh saluran pembuangan jaringan, disedot ke empat stasiun bawah tanah yang memompanya melalui 10 km, diameter 1200 mm pipa tekanan ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Proses pengolahan limbah menggunakan *Anaerobic Baffled Reactor (ABR)*, *Biological Trickling Filter (BTF)*, *Clarifier*, *Klorinator* dan pengeringan lumpur. Bau dari pabrik dikendalikan, dengan gas diekstraksi dari menutupi unit ABR yang sedang menyala, sementara udara busuk diekstraksi dari unit pra-perawatan, BTF dan karya tambahan diperlakukan oleh unit filter biologis. IPAL akan dibangun di atas tanah seluas 5,9 ha yang dibeli oleh Pemerintah Kota untuk tujuan ini pada tahun 2012. Level situs akan dinaikkan setidaknya 2 m dengan isian teknik yang akan diizinkan untuk menetap dan stabil selama setidaknya 12 bulan sebelum IPAL konstruksi dimulai. Limbah dari IPAL akan mengalir melalui saluran gravitasi pendek ke titik pembuangan garis pantai ke Sungai Musi. Dalam pelaksanaannya di kota Palembang saat ini digambarkan melalui hasil wawancara dengan Ir Ati Hartati, MSc (*Deputy Team Leader CMC*) menyebutkan bahwa:

“Selain pemasangan dan pengairan untuk pembuangan air limbah di kota Palembang ini kami juga melakukan sebuah kegiatan pengelolaan air limbah yang nantinya dibuang lagi. Pada rancangan awal kami melihat bahwa air limbah diperkotaan ini sangat

menjadi momok besar bagi beberapa kota besar khususnya kota Palembang yang mulai gencar dalam upaya pembangunan namun dilain sisi hal kita juga harus mengedepankan sisi ekologis yang kita pegang bersama, disini PSCP hadir dalam upaya menjawab segala permasalahan air limbah di Palembang itu sendiri. Mula mula kami mencoba pelan pelan memasang pipa primer (pipa utama), pipa sekunder (pipa sambungan) dan pipa tersier (pipa perumahan) di wilayah yang dikira penting namun saat ini masih belum berjalan karena kami masih memasang pipa induk atau pipa primer yang dimulai dari rumah pompa di daerah IIR 19 dekat Jembatan Ampera yang berwarna hitam dengan diameter besar sampai ke tempat Instalasi Pengelola Air Limbah di Sei Selayur ini yang masih dikerjakan. Dari rancangan program air limbah limbah yang keluar dari rumah rumah nantinya akan dipompa oleh rumah pompa yang berada di dekat Ampera tersebut untuk di bawa ke tempat instansi pengelolaan air limbah di Sei Selayur, dan disitulah air limbah kembali diolah agar tidak terlalu berbahaya dalam mencemari sungai, sehingga program ini juga akan melakukan sebuah riset dalam pengelolaan air limbah yang tidak berbahaya yang mana akan kita olah berdasarkan ambang batas Baku Mutu Air Limbah Domestik”

Karena keterbatasan anggaran, ruang lingkup proyek yang akan diimplementasikan pada tahap pertama hanya mencakup tangkapan jaringan terbesar, melayani 12.000 properti (1.500 komersial dan 10.500 perumahan). Daerah tangkapan air ini telah dibagi menjadi empat sub-daerah tangkapan air A1, A2, A3, dan A4. Wilayah layanan meliputi bagian timur dari Pusat Bisnis Palembang serta pusat kota di sepanjang tepi utara Sungai Musi. Properti yang

dilayani ditentukan oleh fitur topografi dan geografis, yang juga menentukan batas daerah tangkapan air. Hanya satu stasiun pompa yang dibutuhkan untuk tangkapan ini. Namun, IPAL dan tekanan pipa akan dibangun dengan kapasitas yang cukup untuk semua 21.700 properti. Desain rinci dan dokumen tender untuk skema lengkap telah disiapkan sehingga akan menjadi hal yang relatif sederhana laksanakan cakupan penuh desain secara bertahap, saat pendanaan tersedia di masa depan.

Tujuan langsung dari PCSP adalah untuk meningkatkan kesehatan dan produktivitas penerima manfaat langsung di kota. Mengingat sifat demonstrasi dari proyek, tujuan tambahan adalah untuk memberi tahu Pemerintah Indonesia dan juga kebijakan donor terkait dengan pembiayaan dan pembangunan infrastruktur kota skala besar. Tujuan proyek juga mengikuti pendekatan dua jalur ini, dan adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem saluran air limbah kota yang berkelanjutan yang sejak awal dimiliki, dioperasikan, dan dikelola oleh Pemerintah Kota Palembang.
2. Untuk menunjukkan kelayakan pendekatan alternatif untuk pengiriman sistem saluran air limbah perkotaan itu lebih selaras dengan prinsip-prinsip otonomi daerah.

Di akhir proyek, semua pekerjaan fisik akan selesai dan diserahkan serta semua DFAT pembayaran hibah dilakukan. Hasil akhir proyek yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Palembang memiliki sistem saluran air limbah kota yang berfungsi penuh disampaikan tepat waktu, sesuai anggaran dan sepenuhnya sesuai dengan manajemen keuangan yang berlaku persyaratan, serta perlindungan lingkungan dan sosial.

2. Pengaturan kelembagaan dan manajemen tersedia untuk memungkinkan operasi yang sedang berlangsung dan pemeliharaan sistem yang efisien secara finansial dan ramah lingkungan.
3. Pemerintah Indonesia dan mitra pembangunan dilengkapi dengan bukti yang relevan tentang efektivitas model penerusan hibah untuk pembiayaan dan pengiriman air limbah perkotaan. Tantangan Implementasi proyek PCSP kedepan yang dirumuskan oleh penulis berdasarkan pengamatan di lapangan dan rangkuman wawancara dengan pihak terkait adalah:
 1. Kerjasama antara Pemerintah dan Masyarakat harus intensif dilakukan, diajak untuk patuh, sadar, dan bersedia untuk bekerjasama. Kesadaran masyarakat dalam hal pentingnya instalasi pengelolaan air limbah ini butuh untuk ditingkatkan, sistem instalasi komunal baru bisa berjalan untuk kawasan perumahan komersil, sedangkan masyarakat umum masih banyak yang enggan menyediakan sebagian lahan untuk penampungan sementara IPAL, ditambah masyarakat harus membayar biaya jasa untuk hal ini. Jika ini berjalan, maka justifikasi keuntungan ekonomi yang didapatkan selain dari kesediaan membayar iuran layanan manajemen *sewerage*; menghindari biaya pembangunan dan penyedotan *septic tank* serta peningkatan peluang ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan sebagai hasil dari peningkatan viabilitas dan daya tarik kota untuk bisnis dapat terwujud. Dalam aspek manfaat kesehatan, saat sanitasi masyarakat dalam keadaan bersih maka akan terhindar dari berbagai potensi penyakit sekaligus dapat menghemat biaya

perawatan kesehatan dan produktivitas. Untuk lingkungan, IPAL tidak hanya dialirkan secara aman untuk keberlangsungan biota untuk dibuang ke sungai, namun akan diolah untuk dapat digunakan kembali oleh beberapa industri dan dinas pertamanan kota.

2. Keberlanjutan Pendanaan Donor Internasional bergantung pada performa pemerintah kota. Ketersediaan dana proyek adalah hal yang paling vital dalam pelaksanaan dan keberlanjutan pembangunan, maka Pemerintah kota tidak diperkenankan melakukan sesuatu hal yang merugikan negara seperti tindak korupsi yang nantinya dapat merugikan orang banyak dan mengganggu keberlangsungan program.
3. Memastikan sungai tidak kembali tercemar oleh pembuangan akhir air limbah. Mengusahakan untuk mengelola air limbah yang akan dibuang ke sungai menjadi tidak berbahaya yang nantinya berdampak besar pada pencemaran dan ekosistem di sekitar itu sendiri. Pemerintah Kota harus memastikan ekosistem agar tidak tercemar, sungai jadi lebih bersih, selokan dan lainnya. Selain itu, saat pekerjaan instalasi, pengawasan harus makin diperketat, terutama kondisi masih tercecernya pipa, dan lobang yang menganga tanpa halangan.
4. Program tidak bisa berjalan sendirian tanpa ditopang oleh sinergitas *stakeholders* yang lainnya seperti PDAM, Dinas PUPR, Dinas Sosial, DLHK dan komunitas masyarakat atau kader lingkungan yang telah dilantik dan terbentuk di tingkat kecamatan. Sehingga memungkinkan terjadinya transfer ilmu dan pertukaran gagasan guna implementasi program ini untuk pembangunan kota bersih Palembang dan juga pembangunan

berkelanjutan yang mengedepankan sisi ekologis di kota ini.

Pemerintah pusat telah mengidentifikasi Palembang sebagai salah satu kota prioritas untuk investasi infrastruktur, menganggap kota ini memiliki kemauan politik yang kuat dan komitmen yang baik ditunjukkan oleh peran aktif Pemerintah Kota Palembang dalam beberapa kerjasama Internasional yang berkaitan dan berdampak langsung pada pembangunan kota berkelanjutan ramah lingkungan di Palembang, diantaranya: Palembang adalah salah satu dari tujuh kota yang dinominasikan untuk menerima pinjaman dari German Development Bank KfW untuk limbah padat. Di bawah *ASEAN ESC Model Cities Programme*, Palembang yang merupakan kota terbesar kelima di Indonesia terpilih menjadi salah satu *Model City* Indonesia untuk mengimplementasikan model bank sampah sebagai bagian dari aktivitas manajemen sampah di tingkat komunitas. Periode pelaksanaan proyek Palembang sebagai *Model City* ini dimulai dari tahun 2013 hingga 2017 melalui dana hibah oleh *Japan International Cooperation Agency* (JICA) dan juga dalam waktu dekat akan menerima bantuan keuangan dari Korea untuk pengembangan sistem *drainase*. Palembang juga merupakan salah satu penerima manfaat utama (4,5 juta dolar AS) dari Proyek Peningkatan Lingkungan dan Tempat Tinggal ADB - Fase 2. Proyek ini akan memiliki tiga output: (i) kapasitas kelembagaan untuk mengelola pembangunan perkotaan yang berpihak pada penduduk miskin diperkuat; (ii) infrastruktur di permukiman kumuh ditingkatkan; dan (iii) pemukiman baru untuk keluarga miskin didirikan.

Dalam bidang Infrastruktur, RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) saat ini, pemerintah pusat berencana

untuk mengembangkan jaringan kereta api perkotaan di sembilan kota metropolitan, dan sistem transportasi bus cepat di 29 kota; Palembang telah dipilih sebagai penerima kedua program. Sementara itu, sistem *light rail train* (LRT) sepanjang 22,5 km, dengan dana USD 520 juta yang menghubungkan bandara ke pusat kota dan stadion olahraga utama telah selesai dibangun pada tahun 2017. Sebagian karena inisiatif progresif ini, Palembang telah dipilih sebagai tuan rumah bersama, dengan Jakarta, untuk Asian Games pada 2018. Tujuan utama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2013–18 Kota Palembang (sippa.ciptakarya) adalah realisasinya dari kota internasional yang mandiri secara ekonomi dan menarik banyak investasi. Rencana ini menyoroti pentingnya pembangunan yang adil dan merata yang ramah lingkungan.

Kesimpulan

Pemerintah Kota Palembang secara konsisten telah menunjukkan komitmen dan kapasitasnya untuk menjadi Pemerintah Kota pertama yang menguji coba pendekatan penerusan hibah internasional yang diusulkan untuk PCSP. Meningkatkan kualitas sanitasi di kota secara khusus diidentifikasi sebagai tujuan infrastruktur. Sejak 2012, Kota Palembang telah menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan akses air bersih dan sanitasi untuk warganya. Palembang telah menjadi peserta terbesar kedua dalam program Hibah Air Minum, dimana biaya koneksi rumah baru diganti melalui AIIG. Bersama dengan PCSP, inisiatif ini akan memberikan Palembang portofolio komprehensif program investasi infrastruktur yang didukung oleh donor internasional

dan pemerintah pusat, yang mencerminkan penghargaan tinggi di mana pemerintah kota dilibatkan secara langsung serta, kesempatan *conducting peer to peer communication* dan konsultasi dengan FMC dan CMC untuk mendeteksi tantangan penerapan model dan rekomendasi strategis yang dapat di kembangkan lebih lanjut kedepannya juga menunjukkan bagaimana kota dianggap sebagai aktor utama yang dipercaya dan dalam level yang setara untuk membangun dan melaksanakan kerjasama internasional dalam kerangka *city diplomacy*.

Daftar Pustaka

- Bappenas. T.T. "*Apakah AUSAID?*." Diakses dari [http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Luar%20Negeri/6\)%20Profil%20Lembaga%20Donor/4\)%20AUSAID/Apakah%20AusAID.pdf](http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Luar%20Negeri/6)%20Profil%20Lembaga%20Donor/4)%20AUSAID/Apakah%20AusAID.pdf)
- Cipta Karya. T.T. "*Bab IV Profil Kota Palembang.*" Diakses dari http://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_1495089160BAB_4_dan_5.pdf
- Cipta Karya, Kementerian PUPR (2012). Pengelolaan program hibah air minum. Diakses dari http://ciptakarya.pu.go.id/dok/hukum/pedoman/hibah_air_minum.pdf
- DanKoo-hongChan. 2016. *City Diplomacy and "Glocal" Governance: The Missing Link in Sustainable Development*. Diakses dari http://ic-sd.org/wp-content/uploads/sites/4/2016/06/ICSD_submission_Dan_Koon-hong_Chan_City_diplomacy.pdf
- Department of Foreign Affairs and Trade Australia. (2018). "*AID Program Performance Report 2017-2018.*" Diakses dari <https://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/indonesia-appr-2017-18.pdf>

- Environmental Performances index. (2018). Global Metrics for The Environment: Ranking Country Performance on High-Priority Environmental Issues. *Yale Centre for Environmental Law and Policy, Yale University*. Diakses dari <https://epi.envirocenter.yale.edu/downloads/epi2018policymakerssummaryv01.pdf>
- Garesche, Zapata. (2007). *Guidelines for International Relations of Local Government and Decentralized Cooperation between the European Union and Latin America*. Diputacion de Barcelona. Diakses dari <http://www.obser-ocd.org/temp/liberia-148.pdf>
- Indonesia Australia Partnership for Infrastructure. Project Design Document Palembang City Sewerage Project. (Agustus, 2017). Diakses dari <https://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/indonesia-pcsp-design-document.pdf>
- Katherina, Luh Kitty. (2018). Dinamika Pertumbuhan Penduduk Kota-Kota di Indonesia. *Peneliti Ekologi Manusia Pusat Penelitian Kependudukan LIPI*. Diakses dari <http://kependudukan.lipi.go.id/en/population-study/human-ecology/511-dinamika-pertumbuhan-penduduk-kota-kota-di-indonesia>
- Keiner, Marco dan Arley Kim. (2000). "Transnational City Networks for Sustainability", *European Planning Studies*, ZZ (R).
- La Porte, T. (2012). 'The Impact of "Intermestic" Non-State Actors on the Conceptual Framework of Public Diplomacy', *The Hague Journal of Diplomacy* 7 (4): 441–458.

- Leitmann, Josef. (2006). "Urbanization and Sustainable Development Policy and Administration", in Mudacumura, Gedeon M., Desta Mebratu dan M. Shamsul Haque (eds), 2006. *Sustainable Development Policy and Administration*. New York: Taylor & Francis.
- Prakarsa. (2012). "Hibah Berbasis Hasil." Jurnal Prakarsa Infrastruktur Indonesia. Edisi 12. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/45345-ID-hibah-berbasis-hasil-di-indonesia.pdf>
- Setzer, Joana. (2013). *Environmental Paradiplomacy: The Engagement of the Brazilian State of Sao Paulo in International Environmental Relations*. London: London School of Economics And Political Science.
- Sheng, Yap Kioe. (2011). Urbanisation Wave and ASEAN Regional Agenda. Retrieved from https://asean.org/storage/2017/09/Ch.5_Urbanisation-Wave-and-ASEAN-Regional-Agenda.pdf
- Teoh, Shom. (2017). Progress of ASEAN's Model Cities Report. Thailand.
- UN-Habitat. (2016). Diakses dari <https://www.unhabitat.org/wp-content/uploads/2014/03/WCR-%20Full-Report-2016.pdf>
- Van der Pluijm dalam Gutiérrez-Camps, Arnau. (2013). *Perspectives: Review of Central European Affairs; Prague Vol. 21, Iss. 2*, (2013): 49-61,113.